

Demam Seks di Indonesia

Ariel Heryanto

SEKS, seperti halnya seksualitas dan gender, tidak pernah bersifat alamiah. Dalam seluruh sejarahnya, seks merupakan hasil bentukan masyarakatnya. Ia terbentuk lewat berbagai proses pembinaan dan penindasan yang berbeda-beda, dari satu zaman ke zaman berikutnya.

Karena itu, seks tak bisa dibiarkan secara umum dan sebagai suatu generalisasi. Pembicaraan itu senantiasa menuntut kejelasan batas-batas konteks sosial dan kesejarahannya.

Indonesia pasca 1980-an

Sesudah tahun 1980-an, terjadi suatu perubahan yang cukup mencolok pada sosok masyarakat Indonesia. Di sini hanya perlu disebutkan beberapa saja di antara perubahan itu yang sangat penting.

Sesudah tahun 1980, perekonomian Orde Baru merupakan masa pembangunan tanpa banjir sumber dana dari ekspor minyak. Peristiwa ini sendiri diikuti oleh sejumlah peristiwa lain yang tak kalah penting: serangkaian deregulasi, debirokratisasi, dan paket-paket kebijakan baru lainnya.

Perubahan ekonomi itu mendorong perubahan perhatian masyarakat dalam bidang politik dan ideologi: swastanisasi, keterbukaan dan demokratisasi. Jelas ini menandingi, jika bukan menggantikan, "stabilitas dan keamanan" sebagai tema sentral perbincangan politik dan ideologi dari dekade sebelumnya.

Mungkin ada yang berpendapat, "swastanisasi, keterbukaan dan demokratisasi" merupakan suara meriah dan bising yang tak sesuai dengan kenyataan konkretnya. Boleh jadi pengamatan itu benar. Tapi perubahan "kebisangan" itu sendiri bukan tanpa makna sosial.

Satu contoh kebisingan lain yang penting sejak dekade 1980-

an adalah perbincangan tentang ada-tidaknya "kelas menengah Indonesia". Ini tidak aneh. Kisah kelas menengah merupakan kisah penokohan bagi hikayat besar tentang swastanisasi, keterbukaan dan demokratisasi. Peristiwa dramatik membutuhkan tokoh-tokoh.

Masih dalam rangkaian dinamika sosial yang sama, masa sesudah tahun 1980-an ditandai oleh dua hal yang seakan-akan bertolak belakang. Di satu pihak muncul kebangkitan semangat dan solidaritas keagamaan yang meluap. Di pihak lain, gelombang keasyikan berbincang tentang seks. Keduanya menjadi simbol serta topik-topik diskusi, wawancara atau studi ilmiah bagi berbagai kalangan, dengan minat dan kepentingan yang beraneka ragam.

Ada kelompok yang mendalami penghayatan keagamaan sebagai bagian dari pilihan ibadah dan keimanan. Ada yang mendalami aspek sosial dari kebangkitan religius ini bagi upaya-upaya kemanusiaan dan persatuan bangsa. Ada kelompok moralis yang memprihatinkan merosotnya moralitas seksual di kalangan remaja. Ada banyak pedagang media massa yang menambang laba dari bursa perbincangan tentang seksualitas, dengan sedikit berlagak ikut berprihatin atas permisivitas seks.

Mungkin munculnya tema "kerukunan antaragama" yang menonjol belakangan ini berkaitan dengan potensi ketegangan antaragama yang dikhawatirkan bisa meletup. Ini merupakan gejala sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Tidak juga dikenal di masa Orde Lama. Pertikaian antaraliran, antartarbiat atau antarsuku sudah

menjadi lagu lama di sepanjang sejarah kita. Tapi bukan ketegangan antaragama seperti belakangan ini.

Hal yang sama dapat dikatakan untuk gelombang minat pada seks. Sebagai bangsa Timur, jelas masyarakat kita lebih dahulu punya sejarah keterbukaan dan permisivitas ketimbang masyarakat Barat dalam hal seks. Sampai-sampai pemerintah kolonial harus menjinakkan keterbu-

di antara mereka. Apalagi jika hendak dijelaskan dalam satu kerangka-dasar pengkisan, atau ditata dalam satu bagan atau peta persoalan yang rapi.

Kita tak bisa sembarangan menyimpulkan bahwa semua peristiwa itu disebabkan dan dibentuk oleh merosotnya harga minyak di pasaran dunia sesudah tahun 1980-an. Faktor ekonomi ini hanyalah sebagian dari faktor yang bermacam-macam. Bukan satu-satunya, dan mungkin juga yang terpenting bagi semua peristiwa di atas.

Kontroversi RUU perzinahan menunjukkan hal lain yang belum banyak diperhitungkan, yakni proses "seksualisasi". Yang pro dan kontra pada liberalisasi seksual, sama-sama menganggap seks sebagai hal yang penting. Kontroversi ini memberikan efek yang tak jauh berbeda dari iklan-iklan yang erotik dan berbagai diskusi terbuka tentang seks. Semuanya menggiring "seks" ke pusat perhatian masyarakat.

kaan seks bangsa pribumi ini. Tapi baru sejak 1980-an, bangsa kita beramai-ramai menikmati perbincangan serius dan "ilmiah" tentang seks. Ironisnya, perbincangan ini didorong dari budaya kapitalisme akhir Barat, yang sebenarnya lebih terbelakang dalam soal erotika ketimbang Timur.

Kaitan-kaitan yang tidak total

Berbagai gejala yang disebutkan di atas jelas punya kaitan satu dengan yang lain. Tapi sulit sekali menjelaskan kaitan-kaitan

penghematan, dan disiplin.

Dengan kata lain, boleh jadi perluasan dan pendalaman religius masih saudara-sekandung dengan kemerdekaan seksual masyarakat Indonesia. Kedua-duanya adalah anak zaman pembangunan industri kapitalisme Indonesia.

Ada lagi pengamat yang menghubungkan kebangkitan keagamaan dan gairah seks mutakhir ini dengan bangkitnya sosok kelas menengah. Yang terjadi bukan sekadar semaraknya perbincangan tentang agama atau seks, sebagai akibat dari semakin mencoloknya sosok aspirasi kelas menengah ini. Namun sebaliknya: dapat diamati semakin kuatnya aspirasi kelas menengah dalam mewarnai citra dominan keagamaan dan seksualitas kita. Kehidupan agama dan seks kita semakin lama dibuat semakin "tidak kampung" — semakin "bersih" dan "bergaya".

Dalam konteks kesejarahan seperti ini, kita dapat memahami munculnya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perzinahan yang baru. Dalam konteks yang sama itu juga, kita dapat memahami reaksi dan kontroversi dalam masyarakat terhadap RUU tersebut.

Represi dan promosi seksual

Represi seksual merupakan bagian dari sejarah panjang umat manusia. Apalagi sejak zaman kolonial Eropa yang berlanjut hingga kini di banyak negara bekas terjajah, termasuk Indonesia. Tetapi tampaknya, masyarakat kita belum pernah kenal UU se-represif yang diusulkan dalam RUU perzinahan itu.

Jadi, mengapa baru sekarang munculnya? Peminat ilmu sosial tidak usah terburu-buru mendukung atau mengancam isi RUU itu, tapi memahami terlebih dahulu, gejala apakah ini?

Apakah perzinahan di Indonesia sudah luar biasa hebatnya

melebihi negara-negara lain? Sehingga hal itu menjadi sebuah bencana nasional, apabila tidak segera ditindas dengan hukum represif? Sehingga, kita membutuhkan represi seksual yang lebih hebat dari yang dikenal di negara-negara lain?

Munculnya perdebatan tentang RUU perzinahan ini biasanya bersanding dengan perbincangan tentang RUU perkosaan dalam pemikahan. Sejauh yang dapat diikuti dari berbagai pembahasan di media massa, kebanyakan pihak memberikan dukungan bagi RUU perkosaan dalam pernikahan (sebagai perlindungan bagi istri), tapi menolak RUU perzinahan dengan alasan yang berbeda-beda (teknis-administratif, moral, legal, religius, ideologis, dsb).

Ramainya penolakan terhadap RUU perzinahan itu tidak dengan sendirinya menunjukkan tingginya toleransi khalayak terhadap perzinahan. Bisa saja perzinahan tidak direstui khalayak, tetapi khalayak menilai hukum pidana bukanlah lembaga, tempat dan prosedur yang bijaksana untuk menangulunginya.

Apa pun alasan penolakan khalayak, mereka tampaknya mempunyai asumsi atau pengamatan yang sama dengan para perancang RUU. Keduanya menilai perzinahan (juga perkosaan dalam pernikahan) sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat Indonesia mutakhir. Jika tidak, tentu saja RUU tidak disusun. Jika tidak, munculnya RUU itu juga tidak dirisaukan khalayak luas.

Kontroversi RUU itu menunjukkan hal lain yang belum banyak diperhitungkan khalayak, yakni proses "seksualisasi". Baik mereka yang pro maupun kontra pada kemerdekaan (liberalisasi) gairah seksual, sama-sama menganggap seks sebagai sesuatu yang penting, yang serius, yang hebat. Bedanya, yang satu menilai secara positif yang lain negatif.

Kontroversi yang ramai seperti itu memberikan efek yang tidak jauh berbeda dari iklan-iklan

yang erotik dan berbagai diskusi terbuka tentang seks. Semuanya menggiring "seks" ke pusat perhatian masyarakat.

Seks menjadi wilayah yang penting bagi pendefinisian identitas pribadi maupun sosial. Seks menjadi lahan sentral dalam kegiatan ilmu, teknologi dan usaha-dagang. Inilah yang disebut "seksualisasi". Dalam bahasa slogan yang populer di Indonesia: "meng-seks-kan masyarakat dan me-masyarakat-kan seks".

Filosof Perancis bernama Michel Foucault memberikan peringatan tentang hal ini. Jangan dikira keterbukaan untuk mengumbar nafsu dan perbincangan tentang seks akan memberikan kemerdekaan bagi kita. Mungkin justru sebaliknya. Sebab, menurut Foucault, kekuasaan yang menindas kemerdekaan kita tidak bekerja hanya dengan sepele larangan-larangan, sensor atau tabu terhadap pengetahuan dan perilaku. Kekuasaan juga meraja-lela lewat produksi, promosi, pendidikan atau dukungan terhadap perilaku dan pengetahuan. Juga pengetahuan dan perilaku seksual.

Karena itu, Foucault membiarkan perlunya "de-seksualisasi", yakni pengurangan keasyikan memperhatikan soal-soal yang berpusat pada soal seks. Pesan Foucault tampaknya penting untuk masyarakat Indonesia mutakhir yang baru kena demam-seks.

Foucault tidak menganjurkan penindasan gairah seksual, karena hal itu hanya akan mempromosikan seksualisasi lebih seru. Ia hanya mengingatkan hidup ini tidak semesit "daun" seks. Yang diinginkan Foucault agaknya tak jauh berbeda dari kehidupan masyarakat kita sebelum masa kolonial: gairah seks tidak ditindas, tapi juga tidak diilmiahkan, diseminarkan, dikomersialkan, sehingga menjadi pusat kesibukan dan identitas sosial seperti sekarang.

'J Ariel Heryanto, dosen Program Pascasarjana UK Satya Wacana, Salatiga.